



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL MUIS**
2. Jabatan : **DIREKTUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**
3. NHK : **640306**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.985.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 519 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PAGAR ALAM , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 627.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



3. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA TREK EMONDA SL5 SL5 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. MOBIL, KIJANG INOUVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	131.310.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	198.702.257
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.942.012.257
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.942.012.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.